

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Abdurrahman, Muslan. 2009. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. UMM Press : Malang.
- Ali, Ahmad. 1993. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Candra Pratama : Jakarta.
- Apeldoorn, L. J. van. 1971. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Penerbit Pradnya Paramita.
- Arizona, Yance. 2014. *Konstitusionalisme Agraria*. Yogyakarta : STPN Press.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta : Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Green Constitution : Nuansa Hijau dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta : Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_. 2018. *Konstitusi Keadilan Sosial : Serial Gagasan Konstitusi Sosial Negara Kesejahteraan Sosial Indonesia*. Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara.
- Bobbitt, Philip. 1982. *Constitutional Fate, Theory of the Constitution*. Oxford University Press : New York.
- Bodenheimer, Edgar. 1981. *Jurisprudence, The Philosophy and Method of The Law (Revised Edition)*, Fourth Printing. Cambridge : Harvard University Press.
- Bruggink, JJ. H. 2015. *Refleksi Tentang Hukum : Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Cruz, Peter de. 2010. *Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Socialist Law)*. Bandung : Penerbit Nusa Media.
- Dworkin, Ronald. 1978. *Taking Rights Seriously*. Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press.

- Fallon Jr, Richard H. 2001. *Implementing The Constitution*. Harvard University Press : Cambridge.
- Fauzi, Akhmad. 2004. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan : Teori dan Aplikasi*. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
- Friedman, Lawrence M. 2009. *Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung : Penerbit Nusa Media.
- Gadner, Bryan A. 2004. *Black's Law Dictionary (Eighth Edition)*.
- Hatta, Mohammad, *et al.* 1980. *Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945*. Penerbit Mutiara : Jakarta.
- Hart, H.L.A. 1993. *Essays in Jurisprudence and Philosophy*. Oxford : Clarendon Press.
- \_\_\_\_\_. 1994. *The Concept of Law (Second Edition)*. Oxford : Clarendon Press.
- Hiariej, Eddy O.S.. 2009. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*. Penerbit Erlangga : Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- H.S., Salim. 2018. *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam*. Rajawali Pers : Depok.
- Huda, Ni'matul dan Nazriyah, R. 2011. *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Penerbit Nusa Media : Bandung.
- Ismail, Nurhasan. 2006. *Perkembangan Hukum Pertanahan di Indonesia (Suatu Pendekatan Ekonomi Politik)*. Disertasi Universitas Gadjah Mada : Yogyakarta.
- Isra, Saldi, *et al.* . 2010. *Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari Berpikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif)*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi : Jakarta.
- Kaplan, Abraham. 1998. *The Conduct of Inquiry, Methodology for Behavioral Science*. New Jersey : Transaction Publishers (Original Published in 1964 by Chandler Publishing Company).
- Kelsen, Hans. 2006. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung : Penerbit Nusa Media & Penerbit Nuansa.

- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2018. *Kajian Harmonisasi Undang-Undang Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDA-LH) (Disusun Dalam Rangka Rencana Aksi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GN-PSDA)*. Komisi Pemberantasan Korupsi : Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Sidharta, Bernard Arief. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I, Cetakan ke-4)*. Bandung : PT. Alumni
- Leyh, Gregory, *et al.* 2008. *Hermeneutika Hukum*. Penerbit Nusa Media : Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Prenadamedia Group : Jakarta.
- Mayang, Adam Mulya Bunga dan Syahda, Adelline. 2017. *Konstitusionalitas Pengaturan Sumber Daya Alam*. Kode Insiatif bekerjasama dengan The Asia Foundation : Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Liberty : Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Penerbit Universitas Atma Jaya : Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Kapita Selekta Ilmu Hukum*. Yogyakarta : Liberty.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangnya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_ dan Pitlo, A. 2013. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum (Cetakan II)*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Bunga Rampai Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*. Yogyakarta : Liberty.
- \_\_\_\_\_. 2019. *Teori Hukum*. Yogyakarta : CV. Maha Karya Pustaka.

- M.R., Caritas Woro. 2012. *Rekonstruksi Kearifan Lokal Untuk Membangun Hukum Kehutanan Yang Berkelanjutan (Studi Terhadap Masyarakat Hukum Adat Kajang Dan Tenganan Pegringsingan)*. Disertasi program doktor Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada : Yogyakarta.
- Mochtar, Zainal Arifin. 2021. *Kekuasaan Kehakiman (Mahkamah Konstitusi dan Diskursus Judicial Activism vs Judicial Restraint)*. Depok : Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_ dan Hiariej, Eddy O.S. 2021. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*. Jakarta : Red & White Publishing.
- Notohamidjojo, O. 1975. *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*. Jakarta : BPK Gunung Mulia.
- Notonagoro. 1984. *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*. Jakarta : PT. Bina Aksara.
- Nurlinda, Ida. 2008. *Penerapan Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria Menurut Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Kebijakan Pertanahan Nasional*. Disertasi Universitas Gadjah Mada.
- Paton, George Whitecross. 1955. *A Text Book Of Jusrisprudence* (Buku III Diktat Mahasiswa U.N.G.M.). Jajasan B.P. Gadjah Mada : Jogyakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1977. *Azas-Azas Hukum Tata Negara Di Indonesia*. Jakarta : Penerbit Dian Rakyat.
- Puspa, Yan Pramadya. 1977. *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*. Semarang : CV. Aneka Semarang.
- Rahardjo, Satjipto. 1982. *Ilmu Hukum*. Penerbit Alumni : Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Ilmu Hukum (cetakan kedelapan)*. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika : Jakarta.
- Salman, Otje dan Susanto, Anthon F.. 2005. *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*. PT. Refika Aditama : Bandung.
- Sarna, Kadek, et al. 2015. *Hukum Lingkungan : Teori, Legislasi dan Studi Kasus*. JSAID, Kemitraan dan The Asia Foundation : Jakarta.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1995. *Himpunan risalah sidang-sidang dari : Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) (tanggal 29 Mei 1945 - 16 Juli 1945) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) (tanggal 18 dan 19 Agustus 1945) yang berhubungan dengan penyusunan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta : Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Soetiknjo, Iman. 1994. *Politik Agraria Nasional*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Sulistyowati, Tri, *et al.* 2019. *Constitutional Compliance Atas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Lembaga-Lembaga Negara*. Laporan Hasil Penelitian Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan Mahkamah Konstitusi. Diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2019.

Sumardjono, Maria S.W., *et al.* 2014. *Pengaturan Sumber Daya Alam Di Indonesia, Antara Yang Tersurat dan Tersirat. Kajian Kritis Undang-Undang Terkait Penataan Ruang dan Sumber Daya Alam*. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan Gadjah Mada University Press : Yogyakarta.

Suroso, Fajar Laksono. 2018. *Potret Relasi Mahkan Konstitusi-Legislator, Konfontatif atau Kooperatif?*. Genta Publishing : Yogyakarta.

Susanto, Anthon F. 2010. *Ilmu Hukum Non Sistematis, Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*. Genta Publishing : Yogyakarta.

Suseno, Frans Magnis. 1994. *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia.

Sutiyoso, Bambang. 2006. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 1985. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. CV. Rajawali : Jakarta.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Pemelitian Hukum*. UI Press : Jakarta.

Tebbit, Mark. 2005. *Philosophy of Law. An Introduction*. London and New York: Routledge.

Thompson, Claire dan Langill, Steve. 1999. *Common Property. Readings and Resources for Community-Based Natural Resource Management (Volume 6)*. Ottawa, Ontario, Canada : IDRC.

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia : Jakarta.

Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945. 2010. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid 2, Edisi Revisi*. Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945. 2010. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku V Pemilihan Umum, Edisi Revisi*. Jakarta : Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945. 2010. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VII Keuangan, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial, Edisi Revisi*. Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

Yamin, Prof. Mr. Hadji Muhammad. 1959. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid Pertama*. Jakarta : Yayasan Prapanca

---

\_\_\_\_\_. 1960. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid Kedua*. Jakarta : Yayasan Prapanca

---

\_\_\_\_\_. 1960. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid Ketiga*. Jakarta : Yayasan Prapanca

## **B. Jurnal dan Makalah**

Ali, Mohammad Mahrus, *et al*, “*Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru*”. Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 3, September 2015.

Asy'ari, Syukri, *et al*, “*Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*”. Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 4, Desember 2013.

Barak, Aharon. 2022. *A Judge on Judging: The Role of a Supreme Court in a Democracy*. Harvard Law Review, Vol. 116 No.16.

Daci, Jordan. 2010. *Legal Principles, Legal Values and Legal Norms: are they the same or different?*. Academicus : International Scientific Journal. MMX.

Dagan, Hanoch dan Heller, Michael A. 2001. *The Liberal Commons*. The Yale Law Journal, Vol.110.

Ginsburg, Tom and Stephanopoulos, Nicholas. 2017. *The Concepts of Law*. *University of Chicago Law Review*: Vol. 84 : Iss. 1 , Article 8.

Hart, H.L.A. 1958. *Positivism and the Separation of Law and Morals*. Harvard Law Review, Vol. 71, No. 4.

Jiménez, Felipe. 2020. *Legal Principles, Law, and Tradition*. Yale Journal of Law and the Humanities, Vol. 33.

Lujala, Päivi, “*Classification Of Natural Resources*”, Paper prepared for presentation at the 2003 ECPR Joint Session of Workshops, Edinburgh, UK 28.3 – 2.4. Department of Economics Norwegian University of Science and Technology, Dragvoll NO-7491 Trondheim, Norway, 2003.

Lumbuun, Topane Gayus, “*Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh DPR RI*”. Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 6 No. 3 - September 2009.

Maulidi, M. Agus, “*Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi*”. Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 2, Desember 2019.

Mulyani, Lilis, “*Pengelolaan Sumber Daya Alam di Mata Mahkamah Konstitusi : Analitis Kritis atas Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Sumber Daya Alam*”, Jurnal Masyarakat dan Budaya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Volume 10 No. 2, 2008.



- Putri, Intan Permata dan Ali, Mohammad Mahrus, “*Karakteristik Judicial order dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Amar Tidak Dapat Diterima*”. Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 4, Desember 2019.
- Rachman, Irfan Nur, “*Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945*”. Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Volume 13 Nomor 1 Maret 2016.
- Raz, Joseph. 1972. *Legal Principles and the Limits of Law*. The Yale Law Journal, Vol. 81, No. 5.
- Ribot, Jesse C. and Peluso, Nancy Lee. 2003. *A Theory of Access*. Rural Sociology 68(2), page.153-181.
- Schlager, Edella and Ostrom, Elinor. 1992. *Property-Rights Regimes and Natural Resources: A Conceptual Analysis*. Land Economics, 68(3).
- Shane, Peter M.. 2000. *Federalism's Old Deal: What's Right and Wrong with Conservative Judicial Activism*. Villanova Law Review, Volume 45, Issue 2.
- Siahaan, Maruarar, “*Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi*”. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 3 vol. 16 Juli 2009.
- Sikor, Thomas, He, Jun, Lestrelin, Guillaume. 2017. *Property Rights Regimes and Natural Resources: A Conceptual Analysis Revisited*. World Development, Volume 93.
- Syafaat, Muhammad Ali, et al, “*Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 - 2008 dan 2009 – 2013*”, Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Volume 14 No.2, 2017.
- Talmadge, Philip A. 1999. *Understanding the Limits of Power: Judicial Restraint in General Jurisdiction Court Systems*. Seattle University Law Review, Volume 22 Issue 3.
- Ushie, Vanessa, “*The Management and Use of Natural Resources and their Potential for Economic and Social Development in the Mediterranean*”, Istituto Affari Internazionali (IAI) Working Paper, Issue 1329, 2013.
- Utomo, Nurrahman Aji, “*Dinamika Hubungan Antara Pengujian Undang-Undang Dengan Pembentukan Undang-Undang*”. Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015.



Widayati, “*Problem Ketidakpatuhan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang*”. Jurnal Pembaruan Hukum Volume IV No. 1 Januari-April 2017.

Widowati, Dyah Ayu, *et al*, “*Hak Penguasaan Atas Sumber Daya Alam Dalam Konsepsi Dan Penjabarannya Dalam Peraturan Perundang-Undangan*”. Jurnal Legislasi Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Volume 16 No. 2 Juni, 2019.

Zaharia, Carmen and Suteu, Daniela, “*The Natural Resources And Sustainable Development*”, Cercetari Agronomice In Moldova Vol. XLIV, No. 1 (145), 2011.

Zhou, Han-Ru. 2019. *Legal Principles, Constitutional Principles and Judicial Review*. American Journal of Comparative Law, vol.67.

### C. Internet

Detik News, “*24 Putusan Tak Dipatuhi, MK: Pembangkangan Konstitusi, Awal Runtuhnya Bangsa*”, <https://news.detik.com/berita/d-4876464/24-putusan-tak-dipatuhi-mk-pembangkangan-konstitusi-awal-runtuhnya-bangsa>, Detik.com, diakses pada tanggal 22 oktober 2021, Pukul 07.22 Wita.

Duhaime's Law Dictionary, “*Erga Omnes Definition*”, <https://www.duhaime.org/Legal-Dictionary/Term/ErgaOmnes>, Duhaime's Law Dictionary, diakses pada tanggal 22 Oktober 2021, Pukul 05.41 Wita.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “*Prinsip*”, <https://kbbi.web.id/prinsip>, Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 25 Mei 2021 Pukul 10.10 Wita.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “*Asas*”, <https://kbbi.web.id/asas>, Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 25 Mei 2021 Pukul 10.16 Wita.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “*Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang*”, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPUU>, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diakses pada tanggal 8 Januari 2021 Pukul 10.40 Wita.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “*Rekapitulasi Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum*”, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page>

[=web.RekapPHPU](#), Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diakses pada tanggal 8 Januari 2021 Pukul 10.48 Wita.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “*Rekapitulasi Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah/Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*”, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPHPUD>, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diakses tanggal 8 Januari 2021 Pukul 10.50 Wita

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “*Rekapitulasi Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara*”, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapSKLN>, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diakses pada tanggal 8 Januari 2021 Pukul 10.52 Wita.

Oxford Dictionary, “*Definition of Natural Resource in English*”, [https://www.lexico.com/en/definition/natural\\_resources](https://www.lexico.com/en/definition/natural_resources), Lexico, diakses pada tanggal 29 Juni 2021, Pukul 05.58 Wita.

World Trade Organization, “*World Trade Report 2010*”, [https://www.wto.org/english/res\\_e/booksp\\_e/anrep\\_e/wtr10-2b\\_e.pdf](https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/wtr10-2b_e.pdf), World Trade Organization, diakses pada tanggal 30 Juni 2021, Pukul 05.48 Wita.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), “*Glossary of Statistical Terms*”, <https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1740>, Organisation for Economic Co-operation and Development, diakses pada tanggal 28 Juni 2021, Pukul 21.05 Wita.

#### **D. Dokumen Hukum**

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 058/PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 059/PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 060/PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 063/PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 008/PUU-III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 73/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 55/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 122/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 138/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 99/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 3/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 001/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 021/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 022/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 149/PUU-VIII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 9/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 106/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 17/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 111/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 003/PUU-III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 013/PUU-III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 021/PUU-III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 54/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 72/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 45/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 34/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 105/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 70/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 25/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 053/PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 11/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 56/Prp/Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 68/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 22/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 54/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 70/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 50/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 81/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 87/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 88/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 42/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 38/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 96/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Perpu Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 121/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 25/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 30/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 32/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.



Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 10/PUU-X/2012  
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang  
Pertambangan Mineral dan Batubara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 113/PUU-X/2012  
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang  
Pertambangan Mineral dan Batubara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 108/PUU-XII/2014  
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang  
Pertambangan Mineral dan Batubara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 10/PUU-XII/2014  
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang  
Pertambangan Mineral dan Batubara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 81/PUU-XIII/2015  
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang  
Pertambangan Mineral dan Batubara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 58/PUU-XVIII/2020  
tentang Pengujian Undang-Undang 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas  
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan  
Batubara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 65/PUU-XVIII/2020  
tentang Pengujian Undang-Undang 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas  
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan  
Batubara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 002/PUU-I/2003  
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang  
Minyak dan Gas Bumi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 20/PUU-V/2007  
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang  
Minyak dan Gas Bumi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 36/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 65/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 153/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 50/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 84/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 11/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual.

#### **E. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan  
Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007  
Nomor 84)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  
Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-  
Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas  
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi  
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  
Nomor 86)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167)

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang  
Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan  
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor  
130)

Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah  
Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174)

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok  
Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104)

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta  
Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 1996 Nomor 42)

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22)

Undang-undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 162)

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131)

Undang-undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158)

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4)

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147)

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136)

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96)

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217)